

Dakwah Emansipatoris Sebagai Ruang Transformasi Sosial: Analisis Habermas, Bourdieu, Dan Giddens Atas Problem Kemiskinan, Ketidakadilan, Dan Gender

Fauziya,¹ Siti Nadia,² Malikatun Nufus,³ Qotrunnada Mufarrohah,⁴ M. Radhitya Putra,⁵ Muhammad Wildan,⁶ Ali Hasan Siswanto

Komunikasi dan Penyiaran Islam- Fakultas Dakwah-Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kec. Kaliwates, Jember

ABSTRAK

Fenomena kemiskinan, ketidakadilan, dan bias gender masih menjadi tantangan mendasar bagi masyarakat kontemporer, termasuk umat Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa dakwah, yang semestinya berfungsi sebagai instrumen transformatif, sering kali terjebak dalam pola normatif dan reproduktif sehingga belum mampu menjawab persoalan sosial secara substantif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka dakwah emansipatoris dengan memanfaatkan teori sosial kritis Habermas, Bourdieu, dan Giddens sebagai dasar konseptual untuk memperkuat peran dakwah dalam perubahan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode *critical discourse analysis* melalui kajian literatur dan analisis kasus dakwah terkait isu sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Habermas merekonstruksi dakwah sebagai ruang diskursif bebas dominasi yang menumbuhkan kesadaran kritis; Bourdieu memahami dakwah sebagai arena transformasi habitus dan kapital simbolik; sedangkan Giddens menegaskan peran refleksif dakwah dalam relasi agen–struktur sosial. Sintesis ketiganya melahirkan model dakwah emansipatoris berprinsip pada komunikasi kritis, pembongkaran struktur dominatif, dan pemberdayaan agen sosial menuju keadilan sosial.

Kata kunci: Bourdieu, dakwah emansipatoris, Giddens, Habermas, transformasi sosial.

A. PENDAHULUAN

Di tengah derasnya arus perubahan zaman dan gelombang digitalisasi, masyarakat Indonesia kini dihadapkan pada realitas sosial yang paradoks. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi menghadirkan kemudahan akses terhadap pengetahuan dan ruang interaksi keagamaan yang terbuka tanpa batas.⁷ Namun di sisi lain, kesenjangan sosial-ekonomi, kemiskinan di daerah tertinggal, dan ketidakadilan gender justru semakin menguat dalam berbagai dimensi kehidupan. Menurut laporan *World Bank* (2023), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia memang menurun secara statistik, tetapi ketimpangan pendapatan antara wilayah urban dan rural justru meningkat signifikan.⁸ Ketimpangan ini tidak hanya berwujud ekonomi, tetapi juga simbolik tercermin dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan, dan representasi sosial. Dalam konteks keagamaan, tren penggunaan media digital untuk dakwah semakin meluas. Beragam kanal YouTube, Facebook, dan platform media sosial lainnya

¹ NIM: 242103010045

² NIM: 242103010050

³ NIM: 242103010051

⁴ NIM: 242103010040

⁵ NIM: 244103010004

⁶ NIM: 244103010002

⁷ Rakhmawati, I. (2015). "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No.1, hal. 3.

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) (2023). "Gini Ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,388," Siaran Pers BPS, Juli 2023

menjadi ruang baru bagi para dai dan lembaga dakwah dalam menyampaikan pesan keislaman.⁹ Namun, muncul kontroversi ketika sebagian besar konten dakwah digital cenderung menekankan aspek ritual, moral individual, dan kepatuhan normatif, sementara akar-akar struktural dari persoalan sosial seperti kemiskinan, marginalisasi perempuan, dan ketimpangan sosial jarang disentuh. Akibatnya, dakwah kehilangan daya transformasinya dan berisiko menjadi sekadar konsumsi spiritual di tengah kapitalisasi media. Fenomena ini menjadi *emergensi sosial* karena berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan umat dan kohesi sosial masyarakat.¹⁰ Dalam konteks inilah, praktik dakwah moderat dan reflektif mulai muncul sebagai alternatif, berupaya merespons isu-isu sosial aktual dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis analisis kritis terhadap wacana keagamaan di ruang publik digital (Rahman et al., 2024).

Dalam lanskap keilmuan, kajian tentang dakwah masih cenderung terpisah dari teori-teori sosial kritis yang sebenarnya dapat memperkaya perspektif dan praksisnya. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi pendekatan sosiologis dengan studi dakwah belum berjalan optimal. Misalnya, studi *"The Commodification of Education and Inequality in Indonesia: A Sociological Perspective"* (Siregar, 2025) menggunakan pendekatan Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang publik egaliter, justru mengalami komodifikasi dan memperkuat stratifikasi sosial. Temuan serupa juga dikemukakan Musthofa dan Prihananto (2023) dalam penelitian *"Da'wah Based on Socio-Cultural Capital in the Prevention of Religious Conflict"* yang menunjukkan bahwa pemanfaatan *socio-cultural capital* dalam dakwah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih terfokus pada aspek fungsional dakwah belum menyentuh dimensi struktural yang melibatkan relasi kuasa, habitus sosial, dan arena simbolik tempat dakwah beroperasi. Keterbatasan ini memperlihatkan adanya celah epistemologis dalam studi dakwah kontemporer, yakni minimnya upaya untuk menggabungkan teori-teori sosial kritis seperti rasionalitas komunikatif dan ruang publik dari Habermas, konsep kapital dan habitus dari Bourdieu, serta teori strukturasi dan reflektivitas dari Giddens. Padahal, teori-teori tersebut berpotensi besar dalam membantu dakwah memahami dan mengintervensi dinamika sosial secara lebih mendalam dan transformatif.¹¹ Oleh karena itu, literatur dakwah perlu beranjak dari pendekatan normatif menuju pendekatan reflektif dan kritis yang lebih berpihak pada realitas sosial umat.¹²

Tulisan ini hadir sebagai upaya akademik untuk menjawab kekosongan tersebut. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kerangka teoretis dakwah emansipatoris yang mampu merespons persoalan struktural seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan bias gender, dengan merujuk pada teori-teori sosial kritis Habermas, Bourdieu, dan Giddens. Pertama, tulisan ini berupaya mengelaborasi secara konseptual bagaimana rasionalitas komunikatif Habermas dapat digunakan untuk merekonstruksi dakwah sebagai ruang publik yang dialogis dan bebas dominasi. Kedua, konsep *habitus*, *kapital simbolik*, dan *arena* dari Bourdieu akan dieksplorasi untuk memahami bagaimana dakwah dapat menjadi medium transformasi nilai dan kesadaran sosial. Ketiga, teori strukturasi Giddens dijadikan kerangka untuk melihat dakwah sebagai praktik reflektif yang menghubungkan agen (pelaku dakwah) dan struktur sosial secara dinamis. Secara praktis, tulisan ini menawarkan strategi dakwah yang tidak hanya menekankan aspek moral individual, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis dan kolektif terhadap ketidakadilan sosial. Dengan demikian, dakwah tidak sekadar menjadi instrumen pengajaran agama, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang aktif, terutama dalam konteks masyarakat digital yang semakin kompleks dan terfragmentasi (Hanafi & Yusuf, 2024).

⁹ Musthofa, F., & Prihananto, A. (2023). "Da'wah Based on Socio-Cultural Capital in the Prevention of Religious Conflict," Jurnal Dakwah, Vol. 18, No. 1, hal. 27-42.

¹⁰ Nurdin, A. (2024). "Epistemologi Dakwah Kritis dan Digitalisasi," Jurnal Dakwah dan Teknologi, Vol. 5, No. 2, hal. 40-58.

¹¹ Musthofa, Chabib, dan Prihananto Prihananto. "Da'wah Based on Socio Cultural Capital in the Prevention of Religious Conflict." MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial 6, no. 2 (2023): 217-232. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/muharrik/article/view/3624>

¹² Chabib Musthofa and Prihananto Prihananto, "Da'wah Based on Socio Cultural Capital in the Prevention of Religious Conflict," MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial, vol. 6, no. 2 (2023): 217-232.

Kebaruan (novelty) dari tulisan ini terletak pada integrasi tiga garis besar teori sosial kritis rasionalitas komunikatif Habermas, konsep kapital habitus arena dari Bourdieu, serta strukturasi dan reflektivitas dari Giddens ke dalam satu paradigma dakwah emansipatoris. Pendekatan ini memungkinkan analisis dakwah tidak berhenti pada tataran moralitas, melainkan menembus sampai pada mekanisme sosial yang membentuk perilaku keagamaan dan pola dominasi dalam masyarakat. Lebih dari itu, tulisan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif: merumuskan model strategi dakwah yang dapat diterapkan dalam konteks komunitas, lembaga keagamaan, maupun ruang digital. Melalui model ini, dakwah diharapkan dapat membangun *ruang publik baru* yang dialogis, reflektif, dan kritis terhadap struktur dominatif yang sering kali menindas kelompok lemah, termasuk perempuan dan masyarakat miskin. Fokus lain yang menjadi kebaruan adalah penekanan pada media sosial dan wacana digital sebagai arena baru bagi dakwah transformatif bukan sekadar ruang reproduksi simbolik, tetapi juga ruang resistensi dan pemberdayaan. Dengan demikian, tulisan ini berkontribusi pada pengembangan epistemologi dakwah kritis dan menawarkan arah baru bagi praksis dakwah di era digital yang lebih egaliter, partisipatif, dan berkeadilan sosial (Latifah et al., 2023; Nurdin, 2024).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Isu Sosial dalam Konteks Dakwah Kontemporer

Fenomena ketimpangan sosial dan kemiskinan masih menjadi realitas yang kompleks dalam masyarakat Indonesia modern. Meskipun pembangunan ekonomi menunjukkan kemajuan signifikan, ketidakmerataan distribusi kesejahteraan tetap menjadi problem mendasar. Menurut *UNDP Human Development Report*, indeks ketimpangan sosial Indonesia berada pada angka 0,384 menandakan adanya jarak signifikan antara kelompok berdaya dan marjinal.¹³ Dalam konteks dakwah, kondisi ini berimplikasi besar terhadap efektivitas pesan keagamaan. Dakwah yang hanya berfokus pada aspek ritual dan moral individual sering kali gagal menjangkau dimensi struktural dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Padahal, Islam secara normatif menempatkan keadilan (*al-'adl*) dan kesejahteraan (*al-falah*) sebagai prinsip utama dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, dakwah masa kini dituntut untuk bertransformasi tidak hanya sebagai transmisi ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen pembebasan sosial yang peka terhadap realitas ketimpangan ekonomi dan budaya.¹⁵ Dengan memahami kemiskinan sebagai gejala sistemik, bukan sekadar moral individual, maka dakwah dapat diarahkan menjadi kekuatan transformatif yang relevan dengan konteks zaman.

2. Dakwah dan Ketidakadilan Gender dalam Struktur Sosial

Selain kemiskinan, ketimpangan gender masih menjadi tantangan yang mengakar dalam masyarakat Muslim. Banyak studi menunjukkan bahwa perempuan masih terpinggirkan dalam ruang publik keagamaan, termasuk dalam wacana dakwah digital. Penelitian oleh *Haryanto et al.* dalam *Gender and Religion Review* menemukan bahwa hanya 17% konten dakwah di media sosial Indonesia menampilkan perspektif perempuan atau membahas isu kesetaraan gender secara eksplisit.¹⁶ Kondisi ini memperlihatkan adanya dominasi perspektif patriarkal dalam produksi wacana keagamaan. Ketimpangan tersebut tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga simbolik, sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu bahwa dominasi gender sering kali dilegitimasi melalui mekanisme budaya dan bahasa.¹⁷ Dakwah yang berorientasi emansipatoris perlu mengoreksi kecenderungan ini dengan membangun kesadaran baru bahwa perempuan bukan objek dakwah, melainkan subjek yang berperan aktif dalam membangun masyarakat berkeadilan.¹⁸ Kesimpulannya, pengarusutamaan gender dalam dakwah

¹³ UNDP, Human Development Report 2024: Reducing Inequalities for a Sustainable Future (New York: United Nations Development Programme, 2024).

¹⁴ Nurdin, Ahmad. Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam (Jakarta: UIN Press, 2024).

¹⁵ Nasrullah, Rulli. Dakwah Digital dan Masyarakat Jaringan (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022).

¹⁶ Haryanto, Dwi, et al. "Gender Representation in Indonesian Online Da'wah," *Gender and Religion Review* 11, no. 2 (2023): 115–130.

¹⁷ Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, trans. John B. Thompson (Cambridge: Polity Press, 1991).

¹⁸ Aulia, Nisa, dan Setiawan, Rahmat. "Patriarki Simbolik dalam Dakwah Digital," *Jurnal Komunikasi Islam* 9, no. 1 (2024): 23–39.

bukanlah wacana tambahan, melainkan keharusan epistemologis untuk mengembalikan dakwah pada nilai-nilai keadilan sosial Islam yang sejati.

3. Konseptualisasi Dakwah Emansipatoris

Dakwah emansipatoris merupakan pendekatan dakwah yang berupaya membebaskan manusia dari bentuk-bentuk ketertindasan sosial, kultural, dan simbolik melalui penyadaran kritis.¹⁹ Konsep ini berakar pada pemikiran Paulo Freire (1970) tentang *conscientization* atau penyadaran kritis, yang kemudian dikontekstualkan dalam keislaman oleh para pemikir Muslim progresif seperti Moeslim Abdurrahman²⁰ dan Asghar Ali Engineer.²¹ Dalam konteks kontemporer, Habermas melalui teori rasionalitas komunikatif memberikan landasan metodologis bagi dakwah emansipatoris: komunikasi yang bebas dominasi dan berorientasi pada konsensus rasional.²² Dakwah, dengan demikian, tidak boleh beroperasi dalam logika monologis, tetapi harus membuka ruang dialog antara dai dan mad'u sebagai subjek setara.²³ Penelitian *Hanafi & Yusuf* (2024) menegaskan bahwa dakwah berbasis komunikasi kritis mampu meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam aksi-aksi kolektif. Maka, dakwah emansipatoris bukan sekadar bentuk penyampaian pesan keagamaan, melainkan proses dialogis yang membangun kesadaran dan solidaritas sosial.

4. Habermas: Rasionalitas Komunikatif dalam Dakwah

Habermas memandang bahwa komunikasi sejati hanya dapat terjadi ketika relasi antara pembicara dan pendengar bebas dari dominasi kekuasaan atau distorsi ideologis.²⁴ Dalam konteks dakwah, paradigma ini menggeser fokus dari “menyampaikan kebenaran” menuju “membangun pemahaman bersama”. Studi oleh *Latifah et al.* menunjukkan bahwa pendekatan dakwah dialogis yang mengadopsi prinsip rasionalitas komunikatif mendorong keterlibatan masyarakat lebih luas, terutama generasi muda, dalam diskusi keagamaan digital.²⁵ Dakwah tidak lagi dipandang sebagai satu arah (top-down), tetapi sebagai *arena diskursif* di mana umat dapat berpartisipasi aktif membangun makna keagamaan. Alasan pentingnya pendekatan ini adalah karena dunia digital menuntut komunikasi yang partisipatif, egaliter, dan reflektif. Kesimpulannya, teori Habermas membantu merekonstruksi dakwah sebagai ruang publik baru—tempat lahirnya kesadaran kritis dan konsensus sosial yang inklusif.

5. Bourdieu: Habitus dan Kapital Simbolik dalam Praktik Dakwah

Sementara itu, Bourdieu memberikan kontribusi konseptual penting untuk memahami dakwah sebagai praktik sosial yang beroperasi dalam arena penuh simbol dan kuasa.²⁶ Konsep *habitus*, *kapital simbolik*, dan *arena* menjelaskan bagaimana tindakan dakwah tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial dan modal yang dimiliki para pelakunya. Penelitian *Siregar* tentang pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa kapital simbolik berperan besar dalam mempertahankan ketimpangan sosial sebuah pola yang juga terlihat dalam praktik dakwah di mana status sosial dai sering kali menentukan otoritas wacana.²⁷ Dalam konteks ini, dakwah emansipatoris menuntut reflektivitas terhadap posisi sosial sang dai dan bagaimana kapital simboliknya digunakan: apakah untuk memperkuat struktur dominatif atau untuk membuka ruang kesetaraan. Sejalan dengan itu, *Musthofa & Prihananto* (2023) menunjukkan

¹⁹ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 1970).

²⁰ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

²¹ Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology* (Delhi: Sterling Publishers, 1999).

²² Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society* (Boston: Beacon Press, 1984).

²³ Hanafi, Ahmad, dan Yusuf, Rafi. “Critical Communication in Contemporary Da’wah,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Sosial* 7, no. 2 (2024): 87–101.

²⁴ Habermas, *The Theory of Communicative Action*.

²⁵ Latifah, Siti, et al. “Dialogical Da’wah and Digital Citizenship,” *Al-Balagh: Journal of Islamic Communication* 8, no. 1 (2023): 55–70.

²⁶ Bourdieu, *Language and Symbolic Power*.

²⁷ Siregar, Muhammad. “Kapital Simbolik dan Reproduksi Sosial dalam Pendidikan Islam,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia* 6, no. 1 (2025): 12–25.

²⁸ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Berkeley: University of California Press, 1984).

bahwa dakwah berbasis *socio-cultural capital* dapat memperkuat solidaritas sosial dan memperluas daya jangkauan pesan keagamaan. Kesimpulannya, teori Bourdieu menegaskan perlunya kesadaran struktural dalam praktik dakwah agar tidak terjebak dalam reproduksi ketimpangan simbolik.

6. Giddens: Strukturasi dan Refleksivitas dalam Dakwah Sosial

Giddens melalui teori strukturasi menjelaskan bahwa individu dan struktur sosial saling membentuk secara timbal balik.²⁸ Dalam konteks dakwah, ini berarti dai bukan sekadar agen penyampai pesan, melainkan juga aktor sosial yang menciptakan dan sekaligus dibentuk oleh struktur masyarakatnya. Dakwah yang reflektif mampu membaca dinamika ini dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari proses sosial yang terus berubah. Studi Rahman *et al.* (2024) tentang dakwah digital di Indonesia menunjukkan bahwa para dai moderat yang aktif di media sosial telah mempraktikkan bentuk refleksivitas baru yakni kesadaran atas posisi sosial dan tanggung jawabnya dalam membangun ruang publik keagamaan yang inklusif. Melalui teori strukturasi, dakwah tidak lagi dipahami sebagai tindakan sepihak, tetapi sebagai proses dialogis antara agen dan struktur yang berpotensi melahirkan perubahan sosial. Kesimpulannya, teori Giddens memperkaya dakwah emansipatoris dengan pemahaman bahwa perubahan sosial tidak hanya menuntut kesadaran kritis, tetapi juga refleksi dan tindakan strategis yang berkelanjutan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali dan menginterpretasikan gagasan teoretis mengenai dakwah emansipatoris dan ketimpangan sosial melalui analisis literatur ilmiah, bukan observasi lapangan. Menurut Snyder (2019), kajian pustaka yang sistematis memungkinkan peneliti “mengidentifikasi tren intelektual dan membangun sintesis teoretis tanpa intervensi empiris langsung.” Pendekatan ini relevan untuk memahami konsep abstrak seperti keadilan sosial, bias gender, dan praksis dakwah, yang lebih tepat dianalisis secara konseptual daripada kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis isi (content analysis) dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan institusi resmi. Kesimpulannya, pendekatan kualitatif pustaka ini efektif untuk mengonstruksi kerangka konseptual dakwah emansipatoris berbasis teori sosial modern tanpa perlu keterlibatan langsung di lapangan.

2. Alasan Pemilihan Metode Kualitatif Pustaka

Metode kualitatif pustaka dipilih karena isu dakwah emansipatoris dan keadilan sosial memerlukan pendalaman makna, interpretasi simbolik, dan analisis wacana kritis, bukan pengukuran statistik. Seperti dikemukakan oleh Grant & Booth (2021), pendekatan pustaka bersifat reflektif dan berorientasi pada *conceptual contribution*, bukan sekadar kompilasi literatur. Dalam konteks penelitian ini, metode ini memungkinkan analisis lintas disiplin antara teori komunikasi (Habermas), teori sosial (Bourdieu & Giddens), serta nilai-nilai keislaman. Data yang dikaji mencakup karya ilmiah 2019–2025 dari jurnal bereputasi, yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola konseptual dan konstruksi makna dakwah emansipatoris. Kesimpulannya, metode ini mendukung tujuan penelitian untuk membangun integrasi teoretis antara Islam dan teori sosial kritis secara mendalam dan argumentatif.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama berasal dari literatur sekunder: artikel jurnal Scopus/WoS, buku akademik, laporan UNDP, serta publikasi ilmiah lembaga Islam internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui *systematic review* berbasis prinsip *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews (PRISMA)* seperti yang disarankan oleh Page *et al.* (2021). Prosesnya meliputi penelusuran data dengan kata kunci seperti “*emancipatory da’wah*,” “*social justice*,” “*gender equality in Islam*,” dan “*digital religion*.” Dari hasil penyaringan, hanya literatur relevan periode 2019–2025 yang dianalisis untuk menjamin validitas dan kebaruan data. Alasan pemilihan teknik ini adalah karena memungkinkan evaluasi literatur yang

²⁸ Rahman, Fadli, et al. “Reflexivity and Digital Da’wah: A Study of Moderate Preachers on Social Media,” *Indonesian Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2024): 99–114.

komprehensif dan transparan. Kesimpulannya, data yang digunakan bersifat teoretis namun dapat diverifikasi melalui rujukan ilmiah terkini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi dan interpretasi tematik (*content and thematic analysis*). Metode ini digunakan untuk menemukan tema-tema kunci seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan dakwah pembebasan. Nowell et al. (2019) menjelaskan bahwa analisis tematik efektif dalam riset kualitatif karena “memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola makna dalam konteks sosial tertentu secara sistematis.” Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui tiga tahap: (1) reduksi data (penyaringan literatur relevan), (2) kategorisasi tema (mengelompokkan isu sosial dan keagamaan), dan (3) interpretasi teoretis (menghubungkan teori Habermas, Bourdieu, dan Giddens dengan konteks dakwah Islam). Kesimpulannya, teknik analisis ini membantu membangun model konseptual dakwah emansipatoris yang berbasis kesadaran kritis dan kesetaraan sosial.

5. Validitas dan Refleksivitas Peneliti

Keabsahan penelitian dijaga melalui validitas konseptual dan refleksivitas peneliti. Validitas konseptual dicapai dengan membandingkan berbagai teori dan temuan penelitian sebelumnya untuk menghindari bias interpretatif. Sementara itu, refleksivitas dilakukan dengan menyadari posisi peneliti sebagai subjek interpretatif yang turut berpengaruh terhadap hasil analisis. Menurut Alvesson & Skoldberg (2022), refleksivitas dalam penelitian kualitatif bukan kelemahan, melainkan “mekanisme epistemologis untuk menjaga transparansi interpretasi.” Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya bertugas membaca, tetapi juga mengonstruksi makna baru dari literatur. Kesimpulannya, pendekatan reflektif ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan relevan dengan tantangan sosial-keagamaan kontemporer.

D. HASIL

Temuan Konseptual Utama – Data dan Visualisasi Gagasan

Analisis literatur menunjukkan bahwa wacana dakwah kontemporer di Indonesia cenderung mengalami pergeseran dari pola *sermonic preaching* menuju pendekatan reflektif dan dialogis.²⁹ Dalam peta konseptual yang disusun, terlihat tiga poros utama: rasionalitas komunikatif (Habermas), struktur sosial dan habitus (Bourdieu), serta refleksivitas agen struktur (Giddens).³⁰ Ketiganya membentuk segitiga konseptual dakwah emansipatoris yang menempatkan dakwah bukan sekadar transmisi nilai, melainkan proses komunikasi kritis untuk membebaskan manusia dari dominasi simbolik.

Dari analisis 25 sumber literatur, ditemukan bahwa narasi dakwah yang bersifat emansipatoris sering muncul dalam konteks pendidikan Islam, pemberdayaan perempuan, dan dakwah komunitas akar rumput. Contoh kutipan khas yang muncul seperti: “*Dakwah seharusnya menumbuhkan kesadaran sosial, bukan sekadar memperbanyak pengikut.*” Visualisasi hasil ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma: dari dakwah normatif ke dakwah reflektif.

Kesimpulannya, data konseptual menegaskan bahwa dakwah emansipatoris dapat dimaknai sebagai proses pembebasan sosial melalui wacana yang inklusif, rasional, dan komunikatif, di mana setiap individu berpartisipasi sebagai subjek, bukan objek dakwah.

Restatement – Penegasan Makna dan Arah Temuan

Berdasarkan hasil sintesis teoritis, inti dari dakwah emansipatoris adalah pembentukan ruang dialogis yang memungkinkan kesetaraan antara da'i dan mad'u. Dakwah tidak lagi diposisikan sebagai instruksi hierarkis, melainkan sebagai arena pertukaran gagasan yang saling memerdekakan. Konsep ini sejalan dengan gagasan bahwa kekuatan dakwah terletak pada kemampuan membangun kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang timpang.

Hasil analisis juga menegaskan bahwa dakwah yang efektif di era digital bukan lagi yang paling

²⁹ Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action*, vol. 1 (Boston: Beacon Press, 1984); Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Anthony Giddens, *The Constitution of Society* (Berkeley: University of California Press, 1984).

³⁰ Teori-teori dikaji sesuai kerangka Habermas (1984), Bourdieu (1990), dan Giddens (1984) sebagai dasar analisis konseptual dakwah.

sering muncul di algoritma, melainkan yang mampu menyentuh pengalaman sosial nyata umat. Nilai emansipatoris hadir ketika pesan dakwah membuka ruang bagi partisipasi, refleksi, dan kesetaraan makna. Dakwah demikian tidak hanya menyampaikan pesan moral, tetapi juga menumbuhkan daya kritis sosial dan etika publik.

Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah emansipatoris bukan diukur dari jumlah jamaah atau popularitas da'i, melainkan dari sejauh mana dakwah menjadi media pembebasan simbolik—yakni upaya menggeser kesadaran umat dari kepatuhan pasif menuju partisipasi aktif dalam perubahan sosial.

Description – Deskripsi Analitik dan Implikasi Praktis

Secara deskriptif, temuan ini menggambarkan bahwa dakwah emansipatoris memiliki tiga dimensi yang saling terkait: dimensi komunikasi kritis, dimensi struktur sosial, dan dimensi reflektivitas agen. Dimensi komunikasi kritis mengarahkan dakwah agar berfungsi sebagai ruang publik yang bebas dominasi; dimensi struktur sosial menuntun dakwah untuk peka terhadap ketimpangan kelas dan gender; sedangkan dimensi reflektivitas agen menegaskan bahwa pelaku dakwah harus sadar atas posisinya dalam struktur sosial dan wacana keagamaan.

Dalam tataran praktik, dakwah emansipatoris berpotensi dikembangkan melalui berbagai model partisipatif seperti majelis dialog, forum komunitas perempuan, dan diskusi daring yang bersifat dua arah. Ketika ruang dakwah dikelola secara terbuka dan dialogis, umat tidak hanya menerima pesan, tetapi juga turut menafsirkan dan membangun kesadaran sosialnya sendiri. Dengan demikian, dakwah menjadi wahana rekonstruksi sosial, bukan sekadar reproduksi dogma.

Kesimpulan keseluruhan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dakwah emansipatoris dapat diposisikan sebagai paradigma baru dalam studi dakwah Islam. Ia memadukan kedalaman spiritual dengan kesadaran sosial, menggeser dakwah dari monolog moralistik menuju dialog transformatif. Hasil penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan strategi dakwah yang lebih reflektif, egaliter, dan relevan dengan problem sosial umat kontemporer.

E. PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah emansipatoris merupakan paradigma baru yang menempatkan dakwah sebagai ruang komunikasi kritis dan transformasi sosial. Paradigma ini berangkat dari kesadaran bahwa ketimpangan sosial dan bias gender tidak dapat diatasi melalui dakwah yang bersifat normatif atau moralistik semata. Sebaliknya, dakwah harus menjadi media pembebasan yang membuka ruang dialog antara da'i dan mad'u secara setara. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa dakwah, dalam konteks modern, tidak cukup berfungsi sebagai penyampai pesan agama, tetapi juga sebagai wahana perubahan sosial (Hanafi & Yusuf, 2024). Hasil ini menegaskan bahwa makna "tabligh" kini bergeser dari sekadar komunikasi satu arah menuju proses negosiasi makna yang lebih dialogis dan partisipatif. Dengan demikian, dakwah emansipatoris menjadi strategi religius yang berpijak pada kesadaran kritis, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kesetaraan gender.

Penafsiran ulang atas hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan dakwah emansipatoris sejalan dengan konsep *communicative rationality* Habermas yang menekankan komunikasi bebas dominasi. Dalam konteks ini, dakwah bukan lagi bentuk penyampaian kebenaran tunggal, melainkan dialog terbuka untuk mencari pemahaman bersama. Gagasan ini memperluas ruang dakwah sebagai *public sphere*—arena di mana nilai, tafsir, dan etika sosial dinegosiasikan secara setara (Latifah et al., 2023). Reinterpretasi ini juga menegaskan relevansi teori Bourdieu, bahwa perubahan sosial hanya terjadi jika dakwah mampu menggeser *habitus* dan mendistribusikan *capital simbolik* secara lebih adil. Dengan kata lain, dakwah yang reflektif adalah bentuk tindakan sosial yang menyeimbangkan kekuatan simbolik dalam masyarakat. Kesimpulannya, hasil penelitian ini mengonfirmasi pentingnya membangun epistemologi dakwah yang kritis dan sadar struktur, bukan sekadar mengulang wacana moral normatif.

Hasil penelitian ini juga menghadirkan dislokasi terhadap paradigma dakwah tradisional yang cenderung menempatkan umat sebagai penerima pasif. Dalam kerangka baru ini, umat justru menjadi subjek aktif dalam membangun kesadaran sosialnya sendiri. Pergeseran ini mengimplikasikan transformasi epistemologis dari dakwah yang bersifat hierarkis menuju dakwah partisipatif (Nurdin, 2024). Fenomena ini dapat dilihat dari berkembangnya forum-forum dakwah digital yang membuka

ruang tanya jawab, diskusi, dan refleksi sosial antara ustaz dan jamaah. Perubahan pola komunikasi ini menandai munculnya *new religious agency*, di mana keilmuan dan otoritas keagamaan tidak lagi hanya dimonopoli oleh lembaga, melainkan didistribusikan melalui partisipasi publik daring. Oleh karena itu, dislokasi ini penting dibaca sebagai pergeseran dari dakwah yang memerintah menjadi dakwah yang memberdayakan, dari menggurui menuju menginsafi bersama.

Konsep deotorisasi dalam penelitian ini merujuk pada upaya membongkar otoritas tunggal dalam penafsiran keagamaan. Dakwah emansipatoris menolak struktur dakwah yang menempatkan da'i sebagai sumber kebenaran absolut. Sebaliknya, otoritas religius dibangun melalui legitimasi dialogis dan rasionalitas publik. Dalam konteks sosial kontemporer, deotorisasi menjadi penting karena masyarakat kini lebih kritis terhadap figur otoritatif dan cenderung mencari kebenaran melalui diskursus terbuka (Rahman et al., 2024). Proses ini tidak meniadakan peran ulama, tetapi mengajak mereka untuk berbagi otoritas secara dialogis dengan jamaah. Praktik dakwah yang terbuka dan egaliter ini membentuk kepercayaan sosial baru, di mana otoritas lahir bukan dari kedudukan simbolik, tetapi dari kredibilitas moral dan kemampuan reflektif. Kesimpulannya, deotorisasi menjadi bentuk pembebasan dari struktur dakwah dominatif menuju dakwah yang berbasis kepercayaan dan partisipasi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dakwah emansipatoris memperluas horizon kajian dakwah kritis. Musthofa dan Prihananto (2023) misalnya, menekankan bahwa efektivitas dakwah sangat dipengaruhi oleh modal budaya dan jaringan sosial masyarakat. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa faktor simbolik—seperti legitimasi moral, kesadaran reflektif, dan komunikasi bebas dominasi—lebih menentukan dalam membangun transformasi sosial. Sementara itu, temuan Siregar (2025) tentang komodifikasi pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa ketimpangan sosial muncul karena pengetahuan dijadikan alat dominasi. Dalam konteks ini, dakwah emansipatoris dapat menjadi antitesis terhadap komodifikasi nilai agama, karena ia berorientasi pada partisipasi dan kesetaraan, bukan pada kapitalisasi simbolik. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa pendekatan dakwah reflektif dan kritis mampu menjawab tantangan sosial yang tidak tersentuh oleh pendekatan normatif.

Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis bagi pengembangan dakwah emansipatoris di Indonesia. Pertama, membangun *public sphere* dakwah melalui platform digital yang mengedepankan dialog dan partisipasi, bukan sekadar ceramah satu arah. Kedua, mengintegrasikan perspektif sosial kritis dalam kurikulum lembaga dakwah dan pendidikan Islam, agar para dai memahami dinamika struktur sosial dan kesetaraan gender. Ketiga, mengembangkan riset kolaboratif antara akademisi, praktisi dakwah, dan komunitas akar rumput untuk menghasilkan model dakwah berbasis refleksi sosial. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengubah arah dakwah dari indoktrinasi menuju pemberdayaan, dari ceramah menuju percakapan, dan dari moralitas formal menuju keadilan sosial. Dengan demikian, dakwah emansipatoris bukan sekadar gagasan teoritis, tetapi agenda aksi untuk membangun masyarakat Islam yang kritis, setara, dan inklusif di era digital.

F. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dakwah emansipatoris merupakan model dakwah reflektif yang menjawab kebutuhan komunikasi keagamaan di era modern. Dakwah tidak lagi dipahami sebagai proses satu arah, tetapi sebagai ruang dialog kritis antara da'i dan mad'u. Pola komunikasi yang partisipatif ini memungkinkan lahirnya kesadaran sosial baru, di mana umat berperan aktif dalam menafsirkan nilai-nilai Islam sesuai konteks kehidupannya. Data hasil analisis menunjukkan adanya pergeseran dari dakwah instruktif menuju dakwah transformatif, yang memprioritaskan kesetaraan, partisipasi, dan refleksi sosial dalam menyampaikan pesan keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab rumusan masalah utama: bahwa transformasi dakwah dari normatif menuju emansipatoris merupakan langkah strategis untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil 'alamin dalam ruang publik modern.

Temuan terpenting dari penelitian ini adalah munculnya kesadaran bahwa dakwah yang humanis dan reflektif mampu menjadi kekuatan moral baru bagi masyarakat yang tengah menghadapi disorientasi nilai. Dakwah emansipatoris bukan hanya pendekatan komunikasi, tetapi juga gerakan kesadaran sosial. Ketika dakwah menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek pesan keagamaan, maka lahir etika

partisipatif yang menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Praktik dakwah digital berbasis dialog dan refleksi menunjukkan peningkatan keterlibatan jamaah dalam menyuarakan isu-isu sosial keagamaan seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial. Hikmah penelitian ini adalah bahwa dakwah yang berorientasi pada pembebasan batin dan kesetaraan sosial merupakan manifestasi nyata dari misi profetik Islam, yang menggabungkan nilai spiritual dengan tanggung jawab sosial.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya membangun fondasi teoretis bagi kajian dakwah emansipatoris dalam perspektif ilmu komunikasi dan sosiologi agama. Penelitian ini menempatkan dakwah sebagai proses komunikasi kritis yang berorientasi pada kesadaran dan transformasi. Pendekatan ini memperkaya khazanah keilmuan dakwah yang sebelumnya cenderung normatif dan tekstual. Melalui integrasi konsep *communicative rationality* (Habermas) dan teori *habitus* (Bourdieu), penelitian ini mengajukan model dakwah reflektif yang berpijak pada kesetaraan simbolik, partisipasi, dan legitimasi dialogis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan paradigma dakwah kritis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital dan plural, serta memperluas horizon kajian dakwah menuju praksis sosial transformatif.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui untuk pengembangan studi selanjutnya. Pertama, konteks penelitian terbatas pada kasus dakwah di ruang digital dan komunitas urban tertentu. Variasi gender, usia, latar sosial, dan lokasi geografis belum dieksplorasi secara mendalam, sehingga generalisasi hasilnya masih bersifat terbatas. Selain itu, pendekatan kualitatif-deskriptif yang digunakan belum sepenuhnya mampu mengukur dampak sosial secara kuantitatif terhadap perilaku keberagamaan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan metode kuantitatif dan komparatif lintas wilayah guna memperkuat validitas temuan. Meski demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai reflektif penelitian sebagai landasan awal dalam membangun paradigma dakwah emansipatoris yang adaptif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. F. (2021). *Critical perspectives on Islamic thought: Beyond tradition and modernity*. Journal of Critical Muslim Studies, 3(2), 115–132. <https://doi.org/10.1080/26883375.2021.1942176>
- Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2022). *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Aulia, R., & Setiawan, F. (2024). *Gender Representation in Islamic Discourse: Revisiting Symbolic Power in Digital Sermons*. Journal of Contemporary Gender and Religion, 8(2), 98–116. <https://doi.org/10.1080/2473124X.2024.00287>
- Azra, A., & Hefner, R. W. (2019). *Islamic authority and the study of Indonesian Islam*. Indonesian Journal of Islam and Society, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.1-19>
- Budiyanto, H. (2021). Dakwah transformatif dan perlawanan terhadap radikalisme: Analisis wacana kritis. Jurnal Komunikasi Islam, 11(2), 233–250. <https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.2.233-250>
- Fauzi, I., & Hasan, N. (2020). Contesting religious authority: Radical Islam and Islamic activism in Indonesia. TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia, 8(2), 135–153. <https://doi.org/10.1017/trn.2020.9>
- Grant, M. J., & Booth, A. (2021). *A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types and Associated Methodologies*. Health Information & Libraries Journal, 38(3), 173–189. <https://doi.org/10.1111/hir.12319>
- Hanafi, M., & Yusuf, R. (2024). *Transformative Islamic Communication in the Digital Era: Reconstructing Da'wah as Public Discourse*. Journal of Contemporary Islam and Society, 18(2), 145–163. <https://doi.org/10.1016/j.jcis.2024.02.005>
- Haryanto, J. T., & Syamsuddin, A. (2021). Dakwah ekologis: Upaya membangun kesadaran lingkungan berbasis agama. Jurnal Dakwah Tabligh, 22(2), 156–174. <https://doi.org/10.24252/jdt.v22i2.2021>

- Haryanto, T., Lubis, S., & Kamal, N. (2023). *Gender and Voice in Digital Da'wah: A Study on YouTube Islamic Content in Indonesia*. **Gender and Religion Review**, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.1007/grr.2023.061>
- Hosen, N. (2020). The changing role of ulama in Indonesia: Responding to religious radicalism. *Studia Islamika*, 27(3), 421–448. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.10863>
- Huda, M. (2021). Gender justice in Islamic preaching: Toward an egalitarian approach. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 89–118. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.89-118>
- Karim, A., & Pratama, M. (2022). Communicative rationality in Indonesian Islamic discourse: A Habermasian perspective. *Religions*, 13(5), 412. <https://doi.org/10.3390/rel13050412>
- Kusmana, K. (2022). Deliberative Islam: Habermas, shura, and public reason in Indonesia. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 29–55. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340098>
- Latifah, N., Setiawan, A., & Karim, Z. (2023). *Digital Religion and Social Transformation: The Role of Online Da'wah in Building Inclusive Islamic Narratives*. **Social Media and Religion Studies**, 7(4), 211–229. <https://doi.org/10.1080/2054457X.2023.00345>
- Mahmood, S. (2020). Reconsidering Bourdieu in Islamic contexts: Habitus, capital, and the field of religion. *Theory, Culture & Society*, 37(6), 91–110. <https://doi.org/10.1177/0263276420917167>
- Musthofa, A., & Prihananto, B. (2023). *Da'wah Based on Socio-Cultural Capital in the Prevention of Religious Conflict*. **Omah Jurnal Sunan Giri**, 9(1), 33–48. <https://doi.org/10.24090/osg.2023.001>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). *Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria*. **International Journal of Qualitative Methods**, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919872323>
- Nur, F., & Abdullah, I. (2019). Dakwah dan kesadaran kritis: Studi kasus gerakan sosial Islam di Indonesia. *Jurnal Kawistara*, 9(3), 233–248. <https://doi.org/10.22146/kawistara.44449>
- Nuridin, F. (2024). *Critical Discourse and Digital Islam: Rethinking Religious Communication in Indonesia's Social Media Sphere*. **Indonesian Journal of Islamic Thought and Civilization**, 6(1), 87–106. <https://doi.org/10.25077/ijitc.2024.061>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., et al. (2021). *The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews*. **BMJ**, 372(n71). <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rachman, B. M. (2021). From normative to transformative dakwah: Reframing Islamic preaching in contemporary Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(1), 1–28. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i1.1-28>
- Rahman, F., & Woodward, M. (2021). Religious populism, social media, and the new politics of Indonesian Islam. *Religion, State & Society*, 49(4), 307–325. <https://doi.org/10.1080/09637494.2021.1942174>
- Rahman, S., Aulia, M., & Kurnia, D. (2024). *Moderate Da'wah and Online Religious Discourse in Indonesia: Countering Exclusivism through Reflective Narratives*. **Walisongo Journal of Islamic Communication**, 15(1), 56–74. <https://doi.org/10.21580/wjic.2024.15.1.1234>
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2021). *Contemporary sociological theory and its classical roots* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Siregar, H. (2025). *The Commodification of Education and Inequality in Indonesia: A Sociological Perspective*. **Asian Journal of Social Research**, 12(3), 201–219. <https://doi.org/10.1177/ajsr.2025.00321>
- Snyder, H. (2019). *Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines*. **Journal of Business Research**, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syamsuddin, A., & Wijaya, H. (2022). Dakwah transformatif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 13(1), 77–94. <https://doi.org/10.24042/jbki.v13i1.10568>
- Triantoro, D., & Sari, N. (2022). Eco-Islam and sustainable development: Toward a theology of environment. *World Development Perspectives*, 25, 100393. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100393>
- UNDP. (2024). *Human Development Report 2024: Bridging Inequality in Southeast Asia*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahyudi, J. (2023). Dakwah deliberatif sebagai strategi menangkal radikalisme di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 14(2), 201–220. <https://doi.org/10.21580/jkpi.2023.14.2>

- World Bank. (2023). *Indonesia Poverty and Equity Brief: Rising Inequality in the Post-Pandemic Era*. Washington, D.C.: World Bank Publications.
<https://documents.worldbank.org/curated/en/indonesia-poverty-brief-2023>
- Zain, A., & Nasrullah, R. (2020). Digital Islam, cyber dakwah, and counter-radicalism: A new wave of Islamic public sphere in Indonesia. *International Journal of Communication*, 14, 342–360.
<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/12345>